



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Halimah Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

2024



**LAPORAN
KINERJA SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, Kita dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja unit kerja Sekretariat di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Padang, 15 Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Sekretaris,

Irzal Zamzami



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	5
D. Isu-isu Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat.....	13
E. Sistematika Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	16
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	17
C. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
C. Realisasi Anggaran.....	28
D. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	31
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	36
B. Rekomendasi.....	37
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Sumatera Barat TA 2024.....	8
Tabel 1.2	Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri KPU Provinsi Sumatera Barat TA 2024.....	11
Tabel 2.1	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	19
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	20
Tabel 3.2	Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Riset Kepemiluan	23
Tabel 3.3	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	24
Tabel 3.4	Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	25
Tabel 3.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	25
Tabel 3.6	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	26
Tabel 3.7	Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	27
Tabel 3.8	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.....	28
Tabel 3.9	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat 2024	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	13
Grafik 2	Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2024.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.....	7
Gambar 2	Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik 1 dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2024.....	31
Gambar 3	KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan SIAKBA Pemilu Tahun 2024.....	32
Gambar 4	KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik I dalam Manajemen Penanganan Permasalahan Hukum Pada Pemilu Tahun 2024 (Provinsi Sedang).....	33
Gambar 5	KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon.....	33
Gambar 6	KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori sebagai Instansi/Lembaga Peduli Penyiaran	34
Gambar 7	KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI atas pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap pada kategori satuan kerja besar.....	35
Gambar 8	KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik I Tahun 2024 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) kategori wilayah menengah.....	35

RINGKASAN EKSEKUTIF



88,37%

Anggaran yang terealisasi pada Tahun 2024

Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat kepada *stakeholders* terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Hasil kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan

efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat khususnya Sekretariat secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun Anggaran 2024, pagu anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 192.440.071.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 170.063.815.511,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yakni 88.37%, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, pagu anggaran KPU sebesar Rp. 57.570.113.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 52.742.275.943,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yakni 91.61%.

Tabel 1
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2024	Rp. 192.440.071.000,-	Rp. 170.063.815.511,-	88.37%
2	2023	Rp. 57.570.113.000,-	Rp. 52.742.275.943,-	91.61%
3	2022	Rp. 20.689.313.000,-	Rp. 20.504.476.287,-	99.12%
4	2021	Rp. 18.498.611.000,-	Rp. 18.436.876.801,-	99.67%
5	2020	Rp. 109.308.812.000,-	Rp. 103.823.522.100,-	94.92%
6	2019	Rp. 34.639.855.000,-	Rp. 28.347.590.169,-	81.84%

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di tahun 2024 adalah:

1. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik 1 dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2024 pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.
2. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan SIAKBA Pemilu Tahun 2024 pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.
3. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik I dalam Manajemen Penanganan Permasalahan pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.
4. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak 2024 dengan peringkat kedua, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak 2024 yang diadakan di Bali, 14 s.d 17 Desember 2024
5. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI atas pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap pada kategori satuan kerja besar. Penghargaan ini diterima pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pemberian Penghargaan Anugerah SPIP Tahun 2024 di Bandung tanggal 10 s.d 12 Desember 2024.
6. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Barat sebagai Instansi/Lembaga Peduli Penyiaran, dalam acara Anugerah KPID Sumbar 2024 pada hari Rabu, 11 Desember 2024 di Hotel Truntum Padang.
7. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik I Tahun 2024 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) kategori wilayah menengah.

8. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Terbaik 2 se-Indonesia Sosialisasi Tergigih dalam Pemilu Tahun 2024 pada Rapat Koordinasi Kehumasan pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2024 di Surabaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, mengamatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa "*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

LKj Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

2. Tugas

Pasal 193 menyatakan bahwa Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. membantu tugas pelaksanaan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, pada Pasal 194 Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan di Provinsi;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan;
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat masuk pada Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri dari atas:

1. Sekretaris
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Logistik
3. Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 - Sub Bagian Hukum
 - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
4. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Data dan Informasi
5. Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat
 - Sub Bagian SDM
 - Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang proses seleksinya dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 dan baru dilantik pada bulan Mei tahun 2024.

PPNPN adalah pegawai tidak tetap, berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam/*Security*, Pramubakti dan Sopir.

Pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF. JF merupakan sekelompok orang dengan jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, seperti Analis Tata Kelola Pemilu, Analis Pengelola Keuangan dan Analis Hukum.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sebanyak 69 orang yang terdiri dari 39 Pegawai Negeri Sipil, 3 orang PPPK dan 27 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Berikut ini merupakan Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, namun yang digambarkan hanya jabatan struktural dan fungsional saja, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Sumatera Barat TA 2024

No	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Jabatan	Jenjang Pendidikan
1	Irzal Zamzami, S.Sos, M.Si	19740310 199303 1 002	L	Sekretaris KPU	S2
2	Yenrizal Effendi, S.E.	19680403 198803 1001	L	Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Madya	S1
3	Wandrizen, SH	197311192007011002	L	Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Madya	S1
4	AAN WURYANTO, S.H	19730905 200811 1 001	L	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	S1
5	Jumiati, S.Ip	197802192008112001	P	Kabag Parhubmas dan SDM	S1
6	Sutrisno, SE	19790222 200811 1 001	L	Kabag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	S1
7	Fairuz Hayatus Syafari, SE, M.Ikom	197912272009022002	P	Kasubbag Perencanaan	S2
8	Melisa Mivadilla, SE, M.Ikom	198105132008112001	P	Kasubbag SDM	S2
9	Yusrival Yakub, SH	198302022009021003	L	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	S1
10	Rika Yulianti, S.Si	198207142009122003	P	Kasubbag Data dan Informasi	S1
11	Metrina Tosika, SH, M.IP	198605012009122001	P	Kasubbag Hukum	S2
12	Rahman Al Amin, S.IP	198005312010121002	L	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	S1
13	Efri Nofrita, SE, M. Si	198111272009122002	P	Kasubbag Keuangan	S2

14	DOMNI ALEN, S.IP	19850628 201012 1 002	L	Kepala Sub Bagian Umum & Logistik	S1
15	Ade Alfya, S.IP, M.Si	198408092009022004	P	Analisis Pemilihan Umum	S2
16	Arif Hadi Muchlis, S.Sos	197612042008111001	L	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	S1
17	Yurika Amalia, SE, M.Si	198507042010122004	P	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S2
18	Lati Praja Delmana, SE, M.Si	198601232009122004	P	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	S2
19	Silka Hartina, SE	198511052010122003	P	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S1
20	Romi Marza Putra, S.Ip, M.IPol	198303242010121004	L	Analisis Data dan Informasi	S2
21	Febrina Maulidya, S.Ip	197902162009022001	P	Penyuluh Pemilihan Umum	S1
22	Irma Novita, SE, M.Si	198305232009022009	P	Manajemen dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	S2
23	Lettizia, A.Md	197907312007012010	P	Penyusun Laporan Keuangan	DIII
24	Riski, S.Kom	197905172009021104	L	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	S1
25	Ricki Setiawan, A.Md	198309052009021006	L	Pranata Keuangan APBN Mahir	DIII
26	Kurnia Luqmanul Hakim, A.Md	198403142009021006	L	Pranata Keuangan APBN Mahir	DIII
27	Novria, A.Md	198511082009022004	P	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	DIII
28	Riza Fausya, A.Md	198601212009122003	P	Analisis Pemilihan Umum	DIII

21	Febrina Maulidya, S.Ip	197902162009022001	P	Penyuluh Pemilihan Umum	S1
22	Irma Novita, SE, M.Si	198305232009022009	P	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia	S2
23	Lettizia, A.Md	197907312007012010	P	Penyusun Laporan Keuangan	DIII
24	Riski, S.Kom	197905172009021104	L	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	S1
25	Rickt Setiawan, A.Md	198309052009021006	L	Pranata Keuangan APBN Mahir	DIII
26	Kurnia Luqmanul Hakim, A.Md	198403142009021006	L	Pranata Keuangan APBN Mahir	DIII
27	Novria, A.Md	198511082009022004	P	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	DIII
28	Riza Fausya, A.Md	198601212009122003	P	Analisis Pemilihan Umum	DIII
29	Zulparman, SH	197603102007011002	L	Analisis Pengembangan Karir	S1
30	Vera Mayeni, SH	198202102007012002	P	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	S1
31	Mega Hanum, A.Md	198406282010122001	P	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	DIII

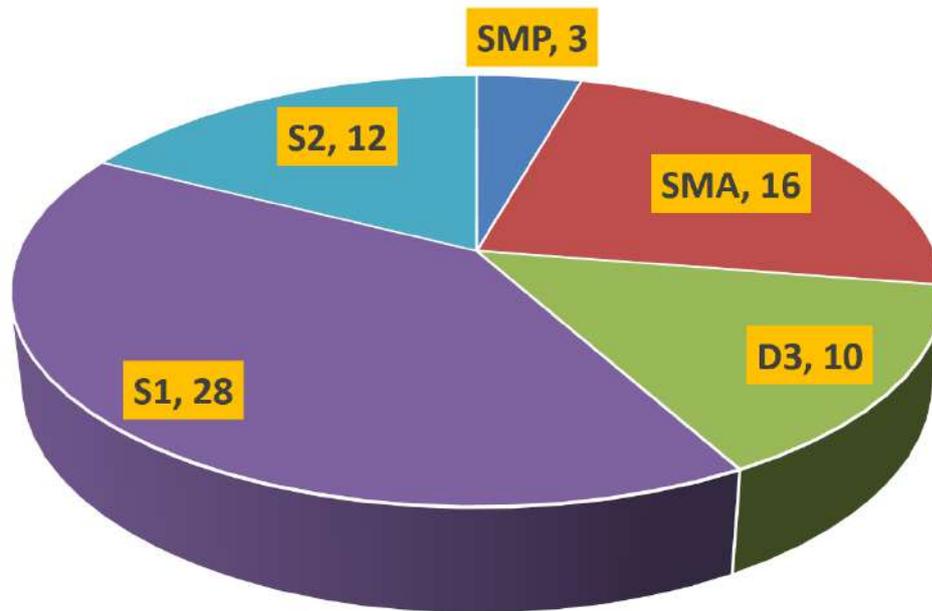
Tabel 1.2
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri KPU Provinsi Sumatera
Barat TA 2024

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Zulmaidi, S.Ds.	Tenaga Administrasi	L	S1
2	M. Hariyanto Prima Saputra, S.H.	Tenaga Administrasi	L	S1
3	Khofifah Idriani Suwardi, S.Kom.	Tenaga Administrasi	P	S1
4	Kin Azura, S.Ds.	Tenaga Administrasi	L	S1
5	Kurnia Fadhil Rael, S.Kom.	Tenaga Administrasi	L	S1
6	Syafridho Syawal Ayuza, S.IP.	Tenaga Administrasi	L	S1
7	Atika Rahmi, A.Md.	Tenaga Administrasi	P	D3
14	Nurman Sjahputra	Pengemudi	L	D3
15	Awalius Agus	Pengemudi	L	D3
16	Dean Ladipo	Pengemudi	L	SMA
17	Muhammad Iqbal, S.IP.	Pengemudi	L	S1
18	Willi Septiawan, S.T.	Pengemudi	L	S1
19	M. Irfanishhadiq	Pengemudi	L	SMA
20	Irawadi	Pengamanan	L	STM

21	Dedet Riswandi	Pengamanan	L	SMK
22	Daka Eka Putra	Pengamanan	L	SMK
23	Feliadi Herman Putra	Pengamanan	L	SMK
24	Robby Fernanda	Pengamanan	L	SMK
25	Prima Septi	Pengamanan	L	SMA
26	Sefra Diko Irwandi	Pengamanan	L	SMA
27	Tasmin Arif	Pengamanan	L	SMK
28	Suci Rahmadani	Pengamanan	P	SMA
29	Wahyu Ilhami	Pengamanan	L	SMA
30	Yondra Oktavian	Pramubakti	L	SMA
31	Oktarizal Wahyudi	Pramubakti	L	PAKET B
32	Putri Lembayu	Pramubakti	P	SMA
33	Rani Novita Sari	Pramubakti	P	SMA

Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS dan PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat
KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



D. ISU-ISU STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan sedang menyelenggarakan Tahapan Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Telah ditetapkan Anggota DPRD Terpilih Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024;
5. Telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
6. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat;

7. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka menunjang dan membantu KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun visi tersebut sebagai berikut: Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.

2. Misi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 2020 sampai tahun 2024, yaitu:

1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Program

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 – 2024, maka Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 melaksanakan 7 (tujuh) sasaran program yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya.
2. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.
3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.
4. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.
5. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.
6. Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
7. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepiluan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%

3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
7	Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset ke pemilu dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset ke pemilu	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
7	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Pada tahun 2024 ini terjadi pergantian Sekretaris tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2024, untuk itu KPU Provinsi Sumatera Barat membuat revisi terkait Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis. Ketujuh sasaran tersebut diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 7 (tujuh) sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset	Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera	85%	80%	94,12%

	Kepemiluan dan Operasionalnya	Barat dengan Lembaga Riset Kepemiluan			
2	Meingkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	90%	90%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	75.15%
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	80%	80%

6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
7	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan Operasionalisasinya
------------------	--

Riset Kepemiluan dilaksanakan untuk menemukan akar permasalahan persoalan yang ditemukan dari setiap periode tahapan Pemilihan sampai akhir pelaksanaan Pemilihan. Riset Kepemiluan diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu di masa yang akan datang.

Indikator kinerja untuk sasaran terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya. Cara perhitungan indikator kinerjanya yaitu

membandingkan jumlah fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga riset kepemiluan, dengan jumlah fasilitasi Kerjasama yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%	80%	94,12%

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat beberapa kali mengadakan Kerjasama dengan berbagai Lembaga guna mensosialisasikan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, fasilitasi Kerjasama terkait Pendidikan Pemilih Berkelanjutan.

Sasaran 2 Meingkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur dari indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan Pegawai PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang lulus dengan yang mengikuti seleksi jabatan, diklat jabatan, diklat kepemiluan, S2 Tata Kelola Pemilu.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase
Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi
Penugasannya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	90%	90%

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi sudah tercapai sebesar 90%. Kegiatan yang sudah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi yaitu:

1. S2 Tata Kelola Pemilu
2. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pelatihan Dasar (Latsar)
4. Ujian Dinas
5. Alih Status
6. Seleksi CPNS
7. Seleksi PPPK
8. Latsar Jagat Saksana

Sasaran 3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat
------------------	---

Sasaran Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat diukur dari indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan prasarana berdasarkan Laporan Barang Milik negara (BMN).

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Sasaran 4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
------------------	--

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, salah satunya dengan meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dengan nilai BB yang sebelumnya B.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	75.15%

Berdasarkan surat dinas Inspektorat KPU RI Nomor 3265/PW.02.8SD/12/2024 tanggal 6 September 2024 perihal Hasil

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mendapat nilai 75,15% (BB).

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 74,95% (BB).

Sasaran 5 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan

Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator kinerja Persentase Satuan Kerja (Satker) yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	80%	80%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 6 Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal

Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Sasaran 7	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
------------------	--

Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum yang baik dan sesuai dengan arahan KPU RI, baik itu dari segi format maupun aplikasi seluruhnya sudah dikelola dengan baik.

Pelayanan informasi hukum yang ada khususnya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dan juga produk hukum lainnya juga dapat di akses oleh publik di laman <https://jdih.kpu.go.id/sumbar>, dan sebagai media informasi dan edukasi yang berkaitan dengan produk hukum melalui Instagram **jdihkpu_sumbar**.

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase produk hukum yang dikelola dan
didokumentasikan sesuai peraturan perundang-
undangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 192.440.071.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 170.063.815.511,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yakni 88.37% dari pagu anggaran tahun 2024.

Terkait dengan capaian keuangan yang tidak mencapai target minimal 99.9% adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor (Listrik, air, internet, pemeliharaan Gedung dan bangunan, dan lain-lain).
2. Efisiensi kegiatan berupa pembayaran honor kelompok kerja, belanja bahan kegiatan, sewa gedung, dan perjalanan dinas)

3. Pembayaran termin I Pengadaan barang dan jasa logistik Tahap II kontrak tahun jamak tidak bisa direalisasikan, karena tidak selesainya proses termin I tahun 2024.
4. Tidak adanya sengketa penetapan peserta pemilu, sehingga anggaran sengketa tidak terealisasi.

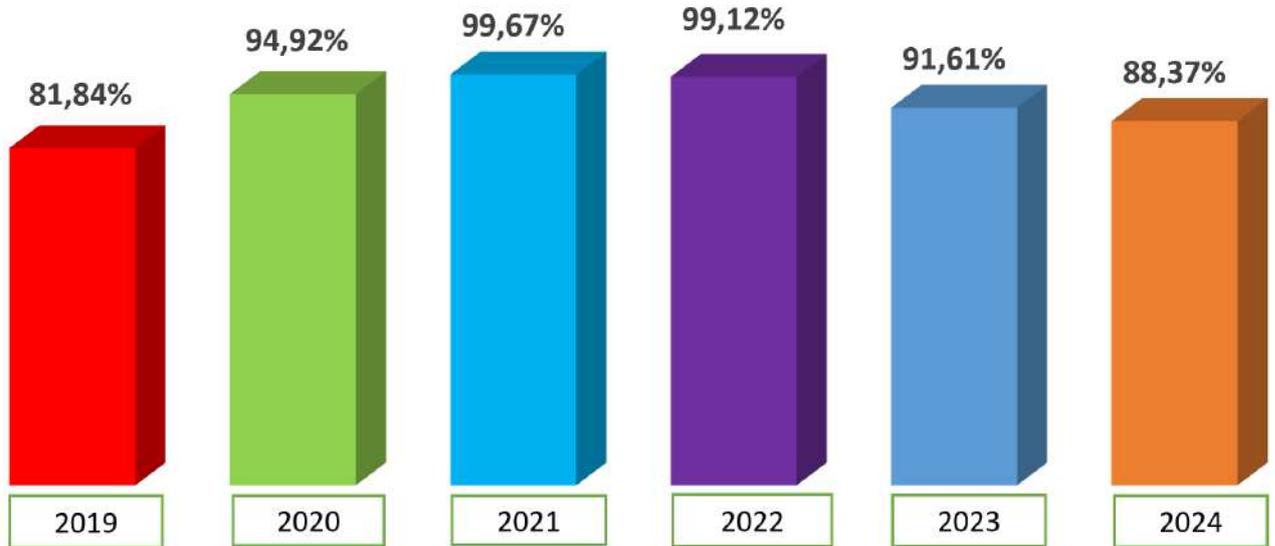
Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen.

Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat
2024

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		180.649.355.000	158.283.282.032	87,62%	22.366.072.968
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	128.290.593.000	106.043.187.322	82,66%	22.247.405.678
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	18.718.635.000	18.674.596.269	99,76%	44.038.731
6867	Pembentukan Badan Adhoc	259.845.000	254.985.167	98,13%	4.859.833
6870	Masa Kampanye Pemilu	11.183.731.000	11.117.881.400	99,41%	65.849.600
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	21.430.086.000	21.428.103.462	99,99%	1.982.538
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	622.430.000	620.591.698	99,70%	1.838.302
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	8.113.000	8.016.000	98,80%	97.000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	135.922.000	135.920.714	100,00%	1.286
WA Program Dukungan Manajemen		11.790.716.000	11.780.533.479	99,91%	10.182.521
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6.699.410.000	6.694.030.214	99,92%	5.379.786
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	5.091.306.000	5.086.503.265	99,91%	4.802.735
TOTAL		192.440.071.000	170.063.815.511	88,37%	22.376.255.489

Grafik 2
Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 s/d 2024



D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

1. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik 1 dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2024 pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.



Gambar 2
Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik 1 dalam Pengelolaan Arsip
Tahun 2024

2. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan SIAKBA Pemilu Tahun 2024 pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.



Gambar 3

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan SIAKBA Pemilu Tahun 2024

3. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik I dalam Manajemen Penanganan Permasalahan pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.



Gambar 4

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik I dalam Manajemen Penanganan Permasalahan Hukum Pada Pemilu Tahun 2024 (Provinsi Sedang)

4. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak 2024 dengan peringkat kedua, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak 2024 yang diadakan di Bali, 14 s.d 17 Desember 2024.



Gambar 5

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon

5. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Barat sebagai Instansi/Lembaga Peduli Penyiaran, dalam acara Anugerah KPID Sumbar 2024 pada hari Rabu, 11 Desember 2024 di Hotel Truntum Padang.



Gambar 6

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori sebagai Instansi/Lembaga Peduli Penyiaran

6. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI atas pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap pada kategori satuan kerja besar. Penghargaan ini diterima pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pemberian Penghargaan Anugerah SPIP Tahun 2024 di Bandung tanggal 10 s.d 12 Desember 2024



Gambar 7

KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI atas pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap pada kategori satuan kerja besar

7. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik I Tahun 2024 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) kategori wilayah menengah, dalam Rapat Koordinasi Sengketa dan Pemberian Anugerah JDIH Tahun 2024 di Jakarta.



Gambar 8

KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik I Tahun 2024 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) kategori wilayah menengah

8. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Terbaik 2 se-Indonesia Sosialisasi Tergigih dalam Pemilu Tahun 2024 pada Rapat Koordinasi Kehumasan pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2024 di Surabaya.



Gambar 9

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Terbaik 2 se-Indonesia Sosialisasi Tergigih dalam Pemilu Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 95.01 %.

Selama TA 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat telah sukses menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan; telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024, Menetapkan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Pemilu dan Pemilihan; telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 170.063.815.511,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) atau 88.37% dari total pagu anggaran sebesar Rp.192.440.071.000,- (Seratus

Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Rupiah).

B. Rekomendasi

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang massif dan melibatkan media massa cetak, elektronik dan media sosial secara kontinyu, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga dalam setiap tahapan pemilu;
2. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dibuat dan diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretaris,

Irzal Zamzami





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang.
Telp: (0751) 446654, Email: prov_sumbangbar@kpu.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepiluan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
8	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Padang, 4 Januari 2024

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Firman', is written over the printed name.

FIRMAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang.
Telp: (0751) 446654, Email: prov_sumbar@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Surya Efitrimen
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 4 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

SURYA EFITRIMEN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepiluan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
8	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3,086,200,000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 13,092,765,000,-

Padang, 4 Januari 2024

KETUA KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT



SURYA EFTRIMEN

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang.

Telp: (0751) 446654, Email: prov_sumbar@kpu.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepililuan dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepililuan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
8	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Padang, 4 Januari 2024

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang.
Telp: (0751) 446654, Email: prov_sumbar@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irzal Zamzami
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Surya Efitrimen
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 1 September 2024

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

SURYA EFITRIMEN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

IRZAL ZAMZAMI

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

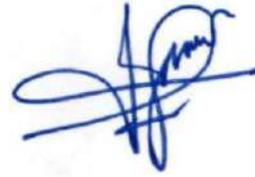
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegiluan dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepegiluan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
7	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 180,994,370,000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 12,130,716,000,-

Padang, 1 September 2024

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name IRZAL ZAMZAMI.

IRZAL ZAMZAMI